

PENANAMAN MODAL DAN INDUSTRIALISASI*

SUHARTOYO

Bangsa Indonesia dalam usahanya membangun diri menjadi satu bangsa yang rakyatnya hidup makmur sejahtera, aman tenteram lahir batin dan kuat di antara bangsa-bangsa di dunia, dewasa ini di bawah pemerintahan Orde Baru sedang giat melancarkan pembangunan nasional di berbagai sektor. Sejak merdeka tiga puluh enam tahun yang lalu, memang baru dalam masa pemerintahan Orde Barulah Bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan nasional secara mantap dan lebih terarah.

Pembangunan nasional merupakan amanat bangsa untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagai mana termaktub dalam UUD 1945. Oleh karena itu amanat ini mutlak perlu dilaksanakan demi untuk mengisi kemerdekaan hasil perjuangan bangsa melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang berabad-abad lamanya sehingga menimbulkan kesengsaraan serta merusak sendi-sendi penghidupan bangsa. Usaha-usaha pembangunan nasional ini digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, GBHN, dengan maksud agar arah dan tujuan pembangunan terwujud sesuai dengan yang diinginkan sehingga secara bertahap tercapailah cita-cita Bangsa.

Sadar akan keterbelakangan di bidang ekonomi, Bangsa Indonesia menetapkan di dalam GBHN, bahwa titik berat pembangunan nasional jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi, dengan tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara industri dan pertanian serta untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat banyak. Penetapan ini memberi arti bahwa struktur ekonomi nasional atau kekuatan pokok penghidupan Bangsa

*Makalah Ir. SUHARTOYO, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada Seminar tentang Industrialisasi Dalam Rangka Pembangunan Nasional, yang diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta, 10-12 Desember 1981.

Indonesia tidak lagi akan tergantung semata-mata kepada kekuatan pertanian, melainkan akan bersumber dari kekuatan dan kemampuan industri dan pertanian yang saling menunjang. Memang ada alasan-alasan yang kuat yang mendukung penetapan ini. Di antaranya ialah pertama, disadari bahwa perekonomian yang hanya didasari kepada kekuatan dan kemampuan pertanian saja, selain akan sangat lamban tumbuhnya juga tidak akan memberikan pertumbuhan yang berarti bagi peningkatan ekonomi nasional. Kedua, tersedianya potensi ekonomi yang cukup kuat seperti sumber daya alam berupa bahan-bahan galian mineral, fauna dan flora, energi, tenaga kerja, areal tanah dan pasaran bagi hasil-hasil produksi, yang cukup potensial yang dapat dipakai sebagai dasar pembangunan kekuatan industri. Oleh karena itu perekonomian yang didasarkan hanya kepada kekuatan dan kemampuan pertanian tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak saja tidak sesuai dengan kondisi Indonesia tetapi juga akan membuat perekonomian Indonesia menjadi statis sehingga tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai.

Usaha-usaha pembangunan untuk mencapai sasaran utama pembangunan di bidang ekonomi dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan melalui serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sebagaimana yang ditetapkan di dalam GBHN, langkah-langkah usaha pembangunan pada setiap Repelita, dari yang pertama yang dimulai pada tahun 1969 sampai kepada yang keempat dan selanjutnya, diarahkan menuju tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yaitu ekonomi yang didasarkan atas kekuatan kemampuan industri yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Ini berarti bahwa hasil pelaksanaan pembangunan lima tahun (Repelita) pada setiap tahap diharapkan akan meningkatkan industrialisasi.

Industrialisasi dapat diartikan sebagai usaha membangun industri baru dan mengembangkan serta membina industri yang ada hingga menjadi tulang punggung dan pokok kekuatan kehidupan bangsa dan negara. Namun, kiranya perlu diperhatikan dan ditekankan di sini bahwa pembangunan dan pengembangan industri yang dimaksud terutama pembangunan dan pengembangan industri dengan landasan struktural yang kuat horisontal dan vertikal yang kelak akan mendukung setiap kepentingan nasional, baik untuk industri itu sendiri, pertanian, maupun untuk pertahanan dan keamanan. Dengan usaha yang demikian ini keterkaitan dan keterpaduan industri yang kokoh akan terwujud, baik intra maupun lintas sektoral. Bertalian dengan ini, kiranya baik juga diungkapkan di sini salah satu bagian pidato Bapak Presiden Soeharto pada pembukaan Rapat Kerja Departemen Perindustrian pada tanggal 10 Juni 1981: "... Hendaknya pembangunan sektor industri kita kembangkan secara terpadu, baik dalam lingkungan industri sendiri maupun dalam hubungannya dengan sektor-sektor lainnya ... tumbuhnya industri-

industri baru, jika tidak kita arahkan secara tepat, dapat menghambat pembangunan dan bahkan melumpuhkan sektor industri sendiri”

Pembangunan industri dengan landasan struktural yang kuat, vertikal dan horizontal mempunyai implikasi yang penting, di antaranya pertama bahwa kekuatan industri itu berdasar kepada bahan-bahan mentah dan atau energi yang berasal dari sumber daya alam sendiri. Kedua, mata rantai produksi dengan kemampuan teknologi yang dimiliki tinggi. Dan ketiga, ialah spektrum produk yang dapat dihasilkan luas. Keuntungan-keuntungan yang dapat dipetik dari sini antara lain ialah ketergantungan dari bahan baku dan produk-produk impor dapat ditekan sampai pada titik kemungkinan yang paling rendah, nilai tambah yang akan diperoleh tinggi, penyerapan tenaga kerja yang dapat dilakukan tinggi dan harga jual produk yang dihasilkan akan murah.

Industrialisasi adalah proses. Sebagaimana lazimnya suatu proses, ia dipengaruhi oleh norma-norma dan inovasi. Oleh karena itu industrialisasi tidak boleh melupakan usaha-usaha standardisasi dan kegiatan-kegiatan perangkat lunak yang mengembangkan kemampuan teknologi untuk menciptakan sistem produksi yang lebih baik.

Hal lain yang kiranya baik untuk dicatat dalam industrialisasi ialah, bahwa industrialisasi tidak mengharuskan orang mendirikan industri untuk menghasilkan sendiri semua produk yang dibutuhkan. Salah satu pertimbangannya yang barangkali baik untuk dipakai sebagai bahan mengambil keputusan ialah sampai seberapa jauh comparative advantage yang dimiliki oleh produk-produk yang akan dihasilkan terhadap produk-produk impor.

Pembangunan nasional sekarang sudah menjalani lebih kurang separuh masa pembangunan jangka panjang apabila masa jangka panjang itu diambil duapuluh lima tahun dan sudah pula menjalani separuh masa Pelita III, dan tentunya setelah itu masuk ke dalam masa Pelita IV. Dalam Pelita IV yang akan datang, industrialisasi diharapkan mencapai suatu taraf di mana industri dalam negeri dapat menghasilkan mesin-mesin industri, baik untuk industri berat maupun ringan, tentunya di samping menghasilkan produk-produk yang lain. Hendaknya dapat disepakati bahwa pengertian menghasilkan dalam hal ini tidak saja memasang atau merakit komponen-komponen melainkan juga membuat bagian-bagian mesin, kemudian merakit menjadi komponen-komponen atau sub-assemblies dan akhirnya merakit komponen-komponen atau sub-assemblies itu menjadi suatu mesin penuh.

Sepanjang pengetahuan yang ada sampai sekarang, boleh dikatakan semua mesin industri dibuat dari logam terutama baja dan aluminium serta paduan-paduannya.

Industri-industri yang menangani produk mesin-mesin melalui proses-proses pembuatan dan perakitan adalah industri-industri engineering yang di dalam penggolongan menurut International Standard for Industrial Classification (ISIC) tergolong di dalam No. ISIC 381, 382, 383 dan 384, masing-masing adalah sebagai berikut:

- No. ISIC 381: industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatan,
- No. ISIC 382: industri manufacture peralatan dan mesin pertanian,
- No. ISIC 383: industri mesin dan aparat listrik yang berukuran kecil,
- No. ISIC 384: industri manufacture, perakitan dan reparasi alat angkutan.

Oleh karena yang dihadapi dalam Pelita IV adalah industrialisasi yang akan menghasilkan mesin-mesin industri maka titik berat dan fokus pembangunan dan pengembangan industri diletakkan dan diarahkan pada pembangunan dan pengembangan industri engineering, khususnya sudah barang tentu industri engineering baja dan aluminium, di samping peningkatan pengembangan industri yang ada yang mempunyai potensi yang kuat untuk mengolah hasil-hasil pertanian, dalam hal ini industri agro (agro industry) seperti pabrik-pabrik gula, kelapa sawit, minyak makan atau minyak goreng dan lain-lain.

Pengembangan industri engineering memerlukan pendekatan-pendekatan. Berpegang pada ketentuan bahwa industrialisasi dilaksanakan dengan struktur industri yang kuat horizontal dan vertikal maka pendekatan dapat dilakukan dari dua arah. Pertama, dari proses produksi dengan pemasangan teknologi strategis, dan kedua, dari produk atau komoditi, dalam hal ini produk-produk atau komoditi-komoditi strategis (strategic products or commodities), atau seringkali juga disebut produk-produk atau komoditi-komoditi spesifik (specific products or commodities). Secara tegas, yang dimaksud dengan produk strategis ialah bagian-bagian strategis dari suatu mesin. Teknologi strategis untuk membuat bagian-bagian mesin adalah penuangan (casting), penempaan (forging), pemesinan (machining) dan pengolahan panas (heat treatment), baik untuk produk-produk besi baja maupun aluminium. Kemampuan teknologi strategis inilah yang menjadi landasan struktur horizontal bagi pembangunan dan pengembangan industri engineering. Landasan struktur vertikalnya ialah industri-industri yang menghasilkan besi kasar seperti besi spons dengan menggunakan gas alam dan pellet besi seperti yang ada di PT Krakatau Steel, dan ingot aluminium dengan menggunakan tenaga listrik-hidro yang bersumber dari tenaga air seperti yang ada di PT Inalum Asahan. Besi spons dan ingot aluminium ini diproses dengan teknologi yang terdapat di landasan struktur horizontal.

Agar industrialisasi pada Pelita memberikan hasil sesuai dengan rencana teknologi strategis seperti yang disebutkan di atas seyogyanya dipersiapkan.

Semua kegiatan pembangunan sebagaimana yang diuraikan tadi memerlukan dukungan pembiayaan berupa penanaman modal, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha dalam rangka Undang-undang No. 1 tahun 1967 (Penanaman Modal Asing, PMA), Undang-undang No. 6 tahun 1968 (Penanaman Modal Dalam Negeri, PMDN) dan BRO tahun 1934.

Apabila kita tinjau beberapa angka yang tersedia sekedar untuk memperoleh gambaran indikatif saja mengenai perkembangan penanaman modal secara nasional, maka pertama-tama akan diberikan suatu gambaran makro dan singkat mengenai perkembangan produk domestik bruto dari segi penggunaannya terutama komponen pembentukan modal domestik bruto untuk kurun waktu 1969-1979. Berdasarkan harga yang berlaku maka nilai nominal pembentukan modal domestik bruto tersebut pada tahun 1969 adalah Rp 317 milyar dan pada tahun 1979 meningkat menjadi Rp 6.917,6 milyar, suatu kenaikan hampir 22 kali lipat, atau hampir dua kali lipat kenaikan nilai Produk Domestik Bruto untuk tahun yang sama (1969: Rp 2.718 milyar; 1979: Rp 30.660,7 milyar; kenaikan lebih dari 11 kali lipat). Peranan pembentukan modal domestik bruto tersebut menjadi 22,6 persen pada tahun 1979.

Sekarang kita telaah bagaimana gambaran penanaman modal yang telah terlaksana atau direalisasikan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1967 (PMA) dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 (PMDN). Realisasi kumulatif PMA untuk periode 1967 - Juni 1980 bernilai sekitar US\$ 3.674,0 juta, dan ini merupakan 39,9 persen dari aplikasi yang telah disetujui Pemerintah Indonesia; realisasi kumulatif PMDN untuk kurun waktu 1968 - Maret 1980 adalah sebesar Rp 1.797,0 milyar yang merupakan 34,7 persen dari seluruh aplikasi yang disetujui Pemerintah.

Apabila dihitung secara kasar, maka nilai realisasi seluruh penanam modal (baik PMA maupun PMDN) tersebut di atas adalah sekitar Rp 3.321,7 milyar; dan ini baru merupakan sekitar 12,6 persen bila dibandingkan dengan nilai kumulatif pembentukan modal domestik bruto selama kurun waktu 1969-1979. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya tepat untuk saling diperbandingkan, namun sekedar sebagai gambaran kasar dan indikatif menunjukkan seberapa besar sebenarnya peranan PMA dan PMDN tersebut terhadap keseluruhan pembentukan modal domestik bruto yang secara riil terjadi dalam perekonomian Indonesia.

Dapat pula dikemukakan bahwa berdasarkan identifikasi sementara, maka sub-sektor perkebunan misalnya memerlukan investasi sekitar US\$ 16 milyar dalam waktu 6-8 tahun mendatang apabila ingin dicapai tingkat perkembangan tertentu dalam produksi sub-sektor perkebunan tersebut; untuk sektor industri telah pula diidentifikasi sekitar 30 proyek kunci yang akan

memerlukan investasi sekitar US\$ 6 milyar dalam jangka waktu 5-6 tahun mendatang. Kalau dibandingkan besar-besaran kebutuhan investasi tersebut dalam 5-8 tahun mendatang dan realisasi penanaman modal yang telah dicapai (baik PMA maupun PMDN) dalam jangka waktu 12-13 tahun yang lalu, maka terlihat bahwa memang perlu usaha-usaha yang luar biasa apabila diinginkan agar PMA maupun PMDN dapat berperan secara lebih besar dalam kebutuhan investasi yang masih dihadapi Indonesia dalam pembangunan ekonominya di masa mendatang.

Suatu hal yang cukup menonjol pula adalah angka realisasi yang relatif rendah (belum mencapai 50,0 persen secara agregatif) baik untuk PMA maupun untuk PMDN; angka realisasi PMDN (34,7 persen) malahan lebih kecil dari angka realisasi PMA (39,9 persen). Kiranya hal itu dapat terjadi oleh karena pelbagai masalah yang dihadapi, namun mungkin juga adalah karena adanya external factors suatu usaha. Di sini kiranya Pemerintah dapat mengusahakan langkah-langkah untuk menanggulangnya, seperti misalnya penciptaan iklim usaha maupun penyediaan prasarana yang lebih menunjang perkembangan realisasi penanaman modal yang lebih cepat. Penanganan ini jelas memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih tangguh antar instansi pemerintah yang ada hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan iklim usaha serta prasarana tersebut.

Selanjutnya tercatat pula bahwa sekitar 60 persen dari realisasi PMA adalah bidang usaha industri; sektor pertanian merupakan bidang usaha dengan hanya 9,2 persen dari seluruh realisasi PMA tersebut. Demikian pula untuk PMDN terlihat bahwa sekitar 60 persen juga dari realisasi PMDN adalah bidang usaha industri, dengan sektor pertanian hanya dengan sekitar 16 persen dari seluruh realisasi PMDN. Ini kiranya menunjukkan kepada kita bahwa masih perlu dan dapat digalakkan promosi untuk menarik minat dan realisasi penanaman modal di sektor pertanian. Seperti misalnya di bidang usaha perikanan yang tampaknya belum dapat secara optimal mengolah kekayaan alam yang ada.

Peningkatan kegiatan di sektor pertanian secara keseluruhan dapat merupakan impetus yang baik bagi pengembangan sektor industri nantinya mengingat misalnya sekitar 60 persen seluruh tenaga kerja diserap di sektor pertanian. Sehingga peningkatan pendapatan dan daya beli akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk industri. Juga karena adanya keterkaitan antara sektor industri dengan sektor pertanian, maka peningkatan kegiatan di sektor pertanian akan memberi peluang untuk pengembangan lebih lanjut cabang-cabang industri yang mempunyai kaitan ke depan dengan sektor pertanian.

Penelaahan lebih lanjut atas realisasi PMA di sektor industri menunjukkan bahwa industri tekstil dan kulit cukup menonjol peranannya, karena lebih dari sepertiga seluruh realisasi PMA dalam kurun waktu 1967 - Maret 1980 adalah dalam cabang industri ini. Menonjol pula bahwa industri logam dasar hanya mencapai sekitar sepersepuluh saja dari seluruh PMA tersebut, dan pula tingkat realisasinya adalah sangat rendah (sekitar 12 persen) bila dibandingkan dengan cabang industri lainnya. Mengingat bahwa dalam Pelita IV nantinya sektor industri sudah diharapkan dapat menghasilkan mesin-mesin untuk industri, kiranya pengembangan penanaman modal di cabang industri logam dasar tersebut perlu dan harus digalakkan di waktu mendatang untuk menunjang dicapainya sasaran Pelita IV yang telah dicanangkan. Mengingat industri logam dasar merupakan landasan untuk pengembangan kemampuan menghasilkan mesin-mesin untuk industri nantinya.

Juga tampak bahwa realisasi di cabang industri yang mengolah kekayaan alam kehutanan, yaitu industri kayu dan kertas masih sangat rendah peranannya dalam keseluruhan realisasi PMA di sektor industri.

Untuk realisasi PMDN di sektor industri tampak pula cabang industri yang mengolah kekayaan kehutanan, yaitu industri kayu dan kertas, sama halnya seperti PMA sebelumnya, peranannya dalam seluruh realisasi PMDN relatif kecil. Demikian pula cabang industri logam dasar dengan hanya 6 persen seluruh realisasi PMDN, menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan minat dunia usaha untuk mengadakan investasi di cabang industri ini.

Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipetik beberapa hal yang cukup menonjol yaitu antara lain *pertama*, bahwa apabila dikehendaki agar penanaman modal dalam rangka PMA maupun PMDN berperan yang berarti dalam kebutuhan investasi untuk pembangunan selanjutnya, perlu ada penggalakkan promosi yang lebih aktif untuk menarik minat dunia usaha. *Kedua*, minat dari PMA maupun PMDN tersebut masih perlu lebih diarahkan dan difokuskan pada cabang-cabang industri yang mengolah kekayaan alam di sektor pertanian serta cabang industri logam dasar yang menunjang tercapainya sasaran Pelita IV maupun industrialisasi pada umumnya, dengan cara penentuan prioritas yang bersifat struktural. *Ketiga*, penciptaan iklim usaha yang memadai agar penanaman modal dunia usaha maupun Pemerintah melalui program-program pembangunannya dapat memberikan dampak positif semaksimal mungkin perlu lebih diatur secara terkoordinasi, sinkron, konsisten serta komprehensif.

Hal-hal tersebut menghendaki agar penanganan penanaman modal harus dilakukan melalui pendekatan program pengembangan penanaman modal yang terpadu.

Hal yang diutarakan sebelumnya merupakan landasan bagi perlunya peningkatan tugas dan fungsi dari BKPM seperti telah dituangkan dalam Kepres No. 33 tahun 1981 baru-baru ini. Melalui forum ini pula, saya mengajukan appeal atau himbauan pada seluruh masyarakat untuk menyadari pentingnya suatu koordinasi dan sinkronisasi, terutama yang dicapai melalui saling memahami serta usaha untuk selalu saling menunjang dalam suatu derap dan gerak langkah yang terpadu.

Implementasi penanaman modal dalam suatu bidang usaha melibatkan berbagai pihak seperti antara lain Departemen-departemen Teknis yang membina bidang usaha yang bersangkutan, yang menangani masalah prasarana (jalan, jembatan, pelabuhan laut, dan sebagainya), berwenang dalam pengaturan sarana institusional seperti kebijaksanaan fiskal dan moneter, tata-niaga dan perdagangan, pengaturan penggunaan tanah, serta lembaga-lembaga perbankan maupun keuangan non-bank. BKPM mendapat penugasan untuk menyelenggarakan usaha-usaha koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan penanaman modal tersebut, serta secara aktif dan terarah mengusahakan timbulnya minat dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dengan menanamkan modalnya di Indonesia.

Tabel 1

PERINCIAN REALISASI KUMULATIF PMA UNTUK PERIODE 1967 - JUNI 1980

Bidang Usaha	Nilai (US\$ Ribu)	Distribusi (Persen)	Ratio Realisasi Terhadap Aplikasi yang Disetujui (Tingkat Realisasi, Persen)
<i>Sektor Primer</i>	1.172.702	31,9	47,9
Pertanian	336.847	9,2	33,8
(Pertanian)	(91.811)	(2,5)	(46,3)
(Kehutanan)	(209.299)	(5,7)	(31,8)
(Perikanan)	(35.737)	(1,0)	(25,6)
Pertambangan	835.855	22,7	57,5
<i>Sektor Sekunder</i>	2.235.321	60,8	36,7
Industri	2.995.382	59,7	36,5
Konstruksi	39.939	1,1	48,7
<i>Sektor Tersier</i>	266.012	7,2	40,1
Perdagangan	9.264	0,2	79,4
Perhubungan/ Pariwisata	113.171	3,1	33,6
Jasa-jasa Lainnya	143.577	3,9	45,8
Jumlah	3.674.035	100,0	39,9

Tabel 2

PERINCIAN REALISASI KUMULATIF PMDN UNTUK PERIODE 1968 - MARET 1980

Bidang Usaha	Nilai (Rp Juta)	Distribusi (Persen)	Ratio Realisasi Terhadap Aplikasi yang Disetujui (Tingkat Realisasi, Persen)
<i>Sektor Primer</i>	509.230	28,3	47,9
Pertanian	297.479	16,5	31,6
(Pertanian/ Peternakan)	(182.683)	(10,2)	(46,7)
(Perikanan)	(11.926)	(0,7)	(30,7)
(Kehutanan)	(102.870)	(0,6)	(20,1)
Pertambangan	211.751	11,8	173,1
<i>Sektor Sekunder</i>	1.062.488	59,1	29,8
Industri	1.062.488	59,1	29,8
<i>Sektor Tersier</i>	225.261	12,5	41,3
Perhubungan/ Pariwisata	97.210	5,4	32,1
Perumahan/ Perkantoran	70.360	3,9	34,7
Prasarana	54.047	3,0	287,1
Usaha-usaha Lain	3.644	0,2	18,9
Jumlah	1.796.979	100,0	34,7

Tabel 3

PERINCIAN DISTRIBUSI DALAM TINGKAT REALISASI KUMULATIF PMA SEKTOR INDUSTRI UNTUK PERIODE 1967 - MARET 1980

Cabang Industri	Distribusi (Persen)	Ratio Realisasi Terhadap Aplikasi yang Disetujui (Tingkat Realisasi, Persen)
- Makanan	7,1	55,8
- Tekstil dan Kulit	34,4	68,2
- Kayu dan Barang Kayu	1,0	41,1
- Kertas dan Barang Kertas	1,7	35,2
- Kimia dan Karet	16,0	47,2
- Mineral Bukan Logam	10,9	35,6
- Logam Dasar	9,9	12,0
- Barang Logam	18,0	84,9
- Lainnya	0,9	177,2
Jumlah (Dalam US\$ Juta)	100,0 (2.434.5)	41,9

Tabel 4

PERINCIAN DISTRIBUSI DAN TINGKAT REALISASI KUMULATIF PMDN SEKTOR INDUSTRI UNTUK PERIODE 1968 - MARET 1980

Cabang Industri	Distribusi (Persen)	Ratio Realisasi Terhadap Aplikasi yang Disetujui (Tingkat Realisasi, Persen)
- Makanan	15,5	43,6
- Tekstil	17,5	23,9
- Kayu	7,0	35,9
- Kertas	5,9	38,0
- Kimia	15,9	31,3
- Mineral Bukan Logam	19,1	48,7
- Logam Dasar	6,2	52,0
- Barang Logam	12,4	56,8
- Lainnya	0,5	23,9
Jumlah (Dalam Rp. Milyar)	100,0 (1.062,5)	29,8